

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Desty Vambia et al (2025). *Analisis Potensi Penerimaan Opsi Pajak Kendaraan Bermotor : Studi Kasus di Kota Yogyakarta*
- Amanda Fitri (2024). *Proyeksi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sumatera Barat dengan berlakunya UU HKPD*
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, A., Yenti, Y., & Wulandari, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 112–126. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/17629>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024*. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Digdowiseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). “Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap IPM Provinsi Kalimantan Selatan”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 102-113.
- Firmansyah (2021). *Desentralisasi fiskal dan implikasinya terhadap kinerja pemerintah daerah*. Jurnal Kebijakan Fiskal, 5(1), 45-58.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariadi, R., Mulyadi, F., & Prasetyo, R. (2024). Perbandingan Penerimaan Daerah Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Opsi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Desentralisasi Fiskal*, 3(1), 25–36.
- Hilmiyah, F., Maretaniandini, S. T., dan Tsabita, Z. A. (2023). Analisis Potensi Opsi Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, 3(1), 123-138
- Ika Agustina (2023) Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. website: ejurnal.ipdn.ac.id/JEKP, e-ISSN 2685-6069
- Kuncoro, M (2020). *Ekonomi Pembangunan : teori, masalah dan kebijakan UPP STIM YKPN*.

- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, A. (2019). *Pengaruh Kebijakan Pajak Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota X*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 14(2), 201-215.
- Lestari, D. W. (2020). *Pengaruh Penerapan Opsen Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Y*. Jurnal Administrasi Publik, 22(3), 405-420.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2020). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Maria Frista Anyelina (2023). *Pengelolaan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Perspektif Optimalisasi Desentralisasi Fiskal*.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.07/2023 tentang *Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang *Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 16 Juni 2023. Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2023 Nomor 85. Jakarta.
- _____ Nomor 35 Tahun 2023 tentang *Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 16 Juni 2023. Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85. Jakarta.
- _____ Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). "Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Kemandirian Fiskal di Riau". *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 38–56.
- Saskia Fadhillah (2025). *Analisis Pengaruh Pemberlakuan Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota*

Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan

- Santoso, D., & Wibowo, H.(2022). “*Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah*”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 11(3), 112-125
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, F., Nugraha, A., & Safitri, I. (2024). Dampak Penerapan Opsen Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Sukabumi. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–57. <https://jurnal.globalscents.com/index.php/jakp/article/view/406>.
- Setiawan, B. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Z*. Jurnal Pajak Indonesia, 18(4), 45-58.
- Sudarmaji, S., & Salim, M. (2017). *Penerapan Opsen Pajak dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten ABC*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(1), 50-61.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Analisis Kasus di Kota Padang*. Jurnal Ekonomi Daerah, 30(2), 115-130.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 120. 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. (2022). *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 5 Januari 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta.
- Wahyuni, S. & Nurhadi, A. (2019). *Implementasi Kebijakan Pajak Daerah dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 20(1), 71-85.
- Widodo, A., & Saputra, B.(2023). “Efektivitas Opsen Pajak dalam Meningkatkan PAD di Provinsi Jawa Barat”. Jurnal Kebijakan Publik, 9(1), 45-60.
- Yuliana, N. (2020). *Efektivitas Opsen Pajak dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kota XYZ*. Jurnal Administrasi Publik, 24(3), 305-318.